

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu proses penyampaian pengetahuan yang bertujuan membentuk manusia yang berbudaya melalui proses pewarisan dan upaya mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang baik. Pembelajaran merupakan konsep yang memiliki ruang lingkup luas dan digunakan dalam banyak hal, seperti yang dikemukakan oleh (Sudjana Sugiartini,2007: 29):

Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan peserta didik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Pembelajaran itu merupakan proses interaksi edukatif antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik dengan pendidik guna terjadinya perubahan, pembentukan, dan pengendalian perilaku. Pembelajaran juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Apabila dilihat dari hasil, maka pembelajaran merupakan hasil dari pengalaman yang dialami oleh setiap individu. Sedangkan dilihat dari fungsi, maka penekanan dari kegiatan pembelajaran itu adalah pada hal-hal atau aspek-aspek penting tertentu, seperti motivasi yang diyakini dapat membantu menghasilkan belajar. Karena

itu, pembelajaran diartikan sebagai suatu pembekalan yang dapat memberikan hasil jika orang-orang berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan, dan pengalaman). Berdasarkan pengertian pembelajaran tersebut, maka pembelajaran mengandung makna bahwa “seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik apabila ia dapat menyumbangkan dirinya bagi kehidupan yang baik atau *begin habitat foor good living* melalui proses, hasil dan fungsi pembelajaran.”(Hamalik,dalam sugiartini.2007: 30). Untuk mencapai tujuan tersebut, guru dapat melakukan modifikasi berbagai metode ataupun model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan akan pencapaian dan tujuan pembelajarannya.

Berdasarkan pengertian ini demikian pembelajaran dapat meliputi segala pengalaman yang diaplikasikan guru kepada peserta didiknya. Makin intensif pengalaman yang dihayatai peserta didik maka kualitas pembelajarannya pun semakin tinggi. Intensitas pengalaman belajar ini dapat dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam proses belajar, baik idalam kelas maupun di luar kelas.

Menurut (Soemantri 1967: 42) “Istilah kewarganegaraan merupakan terjemahan dari “*Civics*” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (*Good citizen*).”

Menurut (Winata Putra 1978: 14)”atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.” Peranan pembelajaran adalah fungsi tugas upaya menciptakan kondisi belajar

membantu membelajarkan anak melahirkan gagasan mereka sendiri yang bagus, makin besar kemungkinannya mereka disuatu kelak menemukan gagasan-gagasan bagus yang belum pernah ditemukan orang lain. Dalam pelaksanaan tugas kegiatan siswa, pertanyaan guru dapat memainkan peranan, akan tetapi itu harus direncanakan secara seksama. Guru harus mampu memimpin dan membimbing siswa belajar bekerja dalam pembelajaran keterampilan serta menciptakan kesibukan yang bermakna, segi penting dalam peranan pembelajaran terdapat mata ajaran sekolah serta guru. Mengetahui arti kata, menemukan arti gagasan pokok dari suatu uraian (Gagne, 1996: 207)

Kesimpulan dari pengertian di atas menurut para ahli kewarganegaraan adalah mata pelajaran disekolah yang diberikan kepada siswa yang bertujuan membentuk menjadi warga Negara yang baik, atau Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap ini didunia barat dikenal dengan "*value education, affective education, moral education, character education*".

B. Pengertian *Model Problem Based Instruction (PBI)*

a. Model *Problem Based Instruction (PBI)*

Model Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dengan masalah nyata, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Dengan demikian siswa diharapkan dapat mengembangkan cara berfikir dan keterampilan yang lebih tinggi. *Problem based instruction* dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan

kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran, melalui pengalaman belajar dalam kehidupan nyata.

Arends dalam Trianto (2007: 68) menjelaskan bahwa "*Problem based instruction* merupakan pendekatan belajar yang menggunakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan peserta didik, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri".

Anies (2003: 1) mengemukakan bahwa "model *Problem based instruction* merupakan suatu metode instruksional yang mempunyai ciri-ciri penggunaan masalah nyata sebagai sebagai konteks peserta didik yang mempelajari cara berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan masalah".

Gallow (2003: 1) menjelaskan bahwa "*Problem based instruction* meletakkan asumsi dasar pada permasalahan yang berbentuk narasi, kasus, atau dunia nyata yang membutuhkan keahlian".

Problem based instruction berpusat pada peserta didik. *Problem based instruction* merupakan salah satu dari berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengaktifkan siswa dalam belajar (Abbas dkk 2007: 8). *Problem Based instruction* adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik (Arends et al., 2001). Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang

topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah.

Model pembelajaran ini mengangkat satu masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Peserta didik diharapkan dapat belajar memecahkan masalah tersebut secara adil dan obyektif. Guru berkewajiban menggiring siswa untuk melakukan kegiatan. Guru sebagai penyaji masalah, memberikan instruksi-instruksi, membimbing diskusi, memberikan dorongan dan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri. Guru diharapkan dapat memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi.

Pelaksanaan *Problem based instruction* didukung dengan beberapa metode mengajar diantaranya metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, penemuan dan pemecahan masalah. Peranan guru disini adalah sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-peran tersebut dapat ditampilkan secara lisan selama proses pendefinisian dan pengklarifikasian masalah. Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: lembaran kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk guru, artikel, jurnal, kliping, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, model analogi, meja dan kursi yang mudah dimobilisasi atau ruangan kelas yang sudah ditata untuk itu.

b. Karakter Problem Based Instruction (PBI)

Arends dalam Trianto (2007: 69-70) menyatakan bahwa pengembangan *Problem based instruction* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah.

Problem based instruction menggunakan masalah yang berpangkal kehidupan nyata siswa dilingkungannya. Masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa, selain itu masalah yang disusun mencakup materi pelajaran disesuaikan dengan waktu, ruang dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Adanya keterkaitan antar disiplin ilmu.

Apabila Problem based instruction diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran tertentu, hendaknya memilih masalah yang autentik sehingga dalam pemecahan setiap masalah siswa melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Penyelidikan autentik.

Problem based instruction mewajibkan siswa melakukan penyelidikan autentik menganalisis dan merumuskan masalah, mengansumsi, mengumpulkan dan menganalisis data, bila perlu melakukan eksperimen, dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah.

4. Menghasilkan dan memamerkan hasil suatu karya.

Problem based instruction menuntut siswa menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Siswa menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Siswa

menjelaskan bentuk penyelesaian masalah dan menyusun hasil pemecahan masalah berupa laporan atau mempresentasikan hasil pemecahan masalah di depan kelas.

5. Kolaborasi.

Problem based instruction memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Guru juga perlu memberikan minimal bantuan pada siswa, tetapi harus mengenali seberapa penting bantuan itu bagi siswa agar mereka lebih saling bergantung satu sama lain, dari pada bergantung pada guru.

Problem based instruction mengacu pada inkuiri, konstruktivisme dan menekankan pada berpikir tingkat tinggi. Model ini efektif untuk mengajarkan proses – proses berpikir tingkat tinggi, membantu siswa membangun sendiri pengetahuannya dan membantu peserta didik memproses informasi yang telah dimiliki. *Problem based instruction* menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Lingkungan belajar yang terbuka menuntut peran aktif siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah sehingga menjadi pembelajar yang mandiri.

c. Ciri-ciri Model *Problem Based Instruction* (PBI)

Terdapat 3 ciri utama dari *Problem based instruction* yaitu :

1. *Problem based instruction* merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi *Problem based instruction*

ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. PBI tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui PBI siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan.

2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. *Problem based instruction* menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran.
3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu; sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Untuk mengimplementasikan *Problem based instruction*, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga atau dari peristiwa kemasyarakatan.

d. Tujuan Pembelajaran *Problem Based Instruction* (PBI)

Problem based instruction tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, tetapi *Problem*

based instruction dimaksudkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar otonom dan mandiri.

Banyak masalah yang ada di lingkungan siswa. Dengan PBI dapat meningkatkan kepekaan siswa dengan situasi lingkungan. Kepekaan tersebut bukan hanya diwujudkan dalam perasaan tetapi ada langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan mereka untuk memberikan solusi bagi masalah tersebut. Dalam hubungannya dengan mata pelajaran IPS aspek PKn di sekolah, guru harus mampu melakukan analisis SKKD, dan menentukan KD/ Indikator mana yang paling tepat digunakan PBI. Indikator-indikator yang memberikan peluang munculnya masalah-masalah dan memerlukan penyelesaian, serta membutuhkan kemampuan berpikir ilmiah adalah indikator indikator yang lebih tepat digunakan PBI.

Tujuan model pembelajaran *Problem based instruction* adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Kerjasama yang dilakukan dalam *Problem based instruction*, mendorong munculnya berbagai keterampilan inkuiri dan dialog dengan demikian akan berkembang keterampilan sosial dan berpikir.
2. Permodelan Peranan Orang Dewasa yang autentik

3. Pembelajar Otonom dan Mandiri

e. **Manfaat *Problem Based Instruction* (PBI)**

Problem based instruction dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti menyelidiki, memahami dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu dibutuhkan dalam pelaksanaan *Problem based instruction* untuk menyelidiki masalah secara bersama. Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif sehingga membuat mereka berpikir tentang masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. *Problem based instruction* tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik.

Peserta didik dilibatkan dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri. Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan dijadikan bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta dapat dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. *Problem based instruction* dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual (Ibrahim dan Nur 2001: 7)

Problem based instruction dapat dijadikan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri. Siswa harus mengansumsi,

mengumpulkan informasi, menginterpretasi data, menginferensi, menganalisis, dan mengevaluasi. Ratumanan dan Holil (2008) berpendapat bahwa pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks.

Problem based instruction dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, keterampilan berpikir dan melibatkan siswa dalam pengalaman nyata. Model ini dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah serta untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsep – konsep penting. (Abbas dkk 2007: 9). Siswa dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan permasalahan serta mencari sendiri jawaban atau pemecahan dari permasalahan yang diajukan melalui penyelidikan autentik dan kerjasama dengan teman kelompoknya sehingga diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian yang dilakukan Sumarsono (2006), penerapan *Problem based instruction* dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran fisika. Penerapan *Problem based instruction* diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai.

f. Langkah-langkah Model Pembelajaran *Problem Based Instruction* (PBI)

1. Pendahuluan

a. Orientasi siswa pada masalah yaitu:

- Guru menjelaskan rencana kegiatan dengan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada saat itu dengan memberikan tugas untuk eksperimen, siswa mempersiapkan eksperimen.
- Menjelaskan logistik yang dibutuhkan yaitu guru menjelaskan kegiatan observasi dan mempersiapkan alat dan bahan untuk observasi
- Memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya dengan menyampaikan TPK.

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar yaitu:

- Membagi kelas menjadi 5 kelompok belajar yang anggotanya heterogen dan terdiri dari 8-9 siswa dengan cara menghitung peserta mulai 1 s/d 8, yang nomor 1 masuk ke kelompok 1, yang nomor 2 masuk ke kelompok 2 dan seterusnya.
- Masing-masing kelompok menghadap satu meja
- Guru membagikan LKS sebagai pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan eksperimen pada saat itu
- Guru menyuruh siswa mempersiapkan alat dan bahan yang sudah tersedia
- Guru memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan eksperimen
- Guru mengingatkan siswa tentang materi yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk merangsang pembentukan ide, pengajuan ide dan

penyusunan konsep dasar serta rasa ketertarikan siswa untuk belajar.

2. Kegiatan inti

a. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok yaitu:

- Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
- Siswa melaksanakan eksperimen.
- Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan hasil eksperimen dari LKS (lembar kerja siswa) untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
- Siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru.

b. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu:

- Siswa mempersiapkan untuk merencanakan hasil pemecahan masalah
- Guru membantu siswa dalam merencanakan dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah
- Guru membantu mereka untuk berbeagi tugas dengan temannya.
- Salah satu kelompok mempresentasikan hasil pemecahan masalah, Kelompok yang presentasi dipilih acak melalui pengundian.

c. Mengevaluasi proses pemecahan masalah yaitu:

- Guru menyuruh siswa untuk mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka.
- Siswa melakukan kegiatan mengavaluasi dengan mencocokkan hasil mereka dengan kelompok.

3. Penutup

Guru menyimpulkan hasil evaluasi peserta didik dengan mencocokkan materinya.

g. Kelebihan *Model Problem Based Instruction (PBI)*

- a. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik.
- b. Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain.
- c. Dapat memperoleh dari berbagai sumber.
- d. Siswa berperan aktif dalam KBM
- e. Siswa lebih memahami konsep matematika yg diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut.
- f. Melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berfikir siswa yang lebih tinggi
- g. Pembelajaran lebih bermakna
- h. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran matematika sebab masalah yang diselesaikan merupakan masalah sehari-hari
- i. Menjadikan siswa lebih mandiri

- j. Menanamkan sikap sosial yang positif, memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain
- k. Dapat mengembangkan cara berfikir logis serta berlatih mengemukakan pendapat

h. Kelemahan Model *Problem Based Instruction* (PBI)

- a. Untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai.
- b. Membutuhkan banyak waktu dan dana.
- c. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini.
- d. Membutuhkan waktu yang banyak
- e. Tidak setiap materi matematika dapat diajarkan dengan PBI
- f. Membutuhkan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, tempat duduk siswa yang terkondisi untuk belajar kelompok, perangkat pembelajaran, dll
- g. Menuntut guru membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang.
- h. Kurang efektif jika jumlah siswa terlalu banyak, idealnya maksimal 30 siswa perkelas.

C. Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

a. Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Kecakapan kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan untuk menerapkan/mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan yang telah dikuasai warga negara. Dalam masyarakat demokratis warga negara

hendaknya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya, disamping hak-hak yang diperolehnya. Dengan demikian terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Kecakapan kewarganegaraan dalam hal ini meliputi kecakapan intelektual serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai masalah warga negara.

Suryadi dalam Adha (2010: 44):

“*Life skills* atau keterampilan hidup dalam pengertian ini mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat. *Life skills* merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja”.

Udin dan Dasim (2012: 205) menambahkan bahwa “*Civic Education* yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensial, sistem *cheks and balances*, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga.

Civic education menurut Cogan dalam Winataputra (2007: 1) secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*”, seperti civics di kelas sembilan dan “*problems of democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini “*civic education*” diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school* yang dirancang untuk mempersiapkan ...*young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Hal itu mengandung makna bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Komponen esensial kedua *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan induk, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) yaitu keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik yang meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi.

b. Kecakapan Intelektual (*Intellectual Skill*)

Branson (1998: 146) kecakapan-kecakapan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus paham dulu tentang isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

The National Standards for Civics and Government dan *The Civics Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* dalam Branson (1998; 146) ‘membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini sebagai: kemampuan mengidentifikasi dan membuat deskripsi; menjelaskan dan menganalisis; dan mengevaluasi, mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu public. *Civic Education* yang bermutu memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monument nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan seperti hari kemerdekaan. *Civic Education* juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud

seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, *civil society*, dan konstitusionalisme”.

Winarno (2013: 146) menambahkan bahwa:

“Kecakapan-kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh *civic education* yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti *check and balance legislative* atau peninjauan ulang hukum (*judicial review*) menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu para warga negara untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lebih lama”.

Civic education yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam menganalisis dan menjelaskan. Menurut Torndike dalam Djaali (2007: 67) “*Intelligence is demonstrable in ability of make good responses from the stand point of truth of fact,*” bahwa orang dianggap cerdas bila responnya merupakan respon yang baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Bila para warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem federal Amerika, sistem hukum, atau *check and balance*, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Para warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisa hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisa ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan

opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab publik dengan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat baik yang dipilih atau diangkat warga negara biasa.

Branson dalam Winarno (2013: 147) dalam suatu masyarakat yang otonom, para warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan ini sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, membuat pertimbangan tentang isu-isu tersebut, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.

Branson (1999: 15-16) mengemukakan berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan intelektual: Kemampuan intelektual: kata-kata berikut ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual:

- a. Mengidentifikasi: untuk mengenali dengan jelas sesuatu yang masih samar yaitu seseorang harus mampu (1) membedakannya dengan yang lain,(2) mengklasifikasikannya dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan,(3) menentukan asal-usulnya.
- b. Mendeskripsikan: untuk mendeskripsikan objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas maupun yang samar. Agar dapat mendeskripsikan, seseorang memerlukan laporan tertulis atau verbal tentang karakteristiknya.
- c. Menjelaskan: untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklarifikasi, atau menerjemahkan sesuatu, seseorang dapat menjelaskan (1) sebab-sebab suatu peristiwa (2) makna dan pentingnya suatu peristiwa atau ide.

- d. Mengevaluasi posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna membuat keputusan mengenai (1) kekuatan dan kelemahan posisi suatu isu tertentu, (2) tujuan yang dikedepankan posisi itu, atau (3) alat yang dipakai untuk mencapai tujuan itu.
- e. Mengambil sikap/posisi: untuk menggunakan kriteria atau standar guna mencapai suatu posisi seseorang dapat mendorong (1) memilih dari berbagai alternatif pilihan, atau (2) membuat pilihan baru.
- f. Membela posisi: untuk (1) mengemukakan argumen atas sikap yang diambil dan (2) merespon argumentasi yang tidak disepakati.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai kecakapan intelektual bahwa untuk memahami unsur-unsur dari kecakapan intelektual dapat kita ketahui dari kata-kata mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Dari kata-kata tersebut maka kita dapat memahami mengenai inti dari kecakapan intelektual tersebut.

c. Kecakapan Partisipatoris (*Participatory Skill*)

Di samping mensaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dalam masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Kecakapan-kecakapan tadi itu, dapat dikategorikan sebagai interaksi (*interacting*), memonitoring (*monitoring*), dan mempengaruhi (*influencing*). Interaksi berkaitan

dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Berinteraksi adalah menjadi tanggapan terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Memonitor proses politik dan pemerintahan mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara. Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi, mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan, baik proses-prose formal maupun informal dalam masyarakat. (Udin dan Dasim 2012: 203)

Sangat penting membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus.

Jika menghendaki agar warga negara dapat mempengaruhi jalannya kehidupan politik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam kecakapan-kecakapan partisipatoris itu. Voting tentu merupakan alat yang paling penting dalam rangka mempengaruhi; tetapi ia bukanlah satu-satunya cara. Warga negara perlu belajar menggunakan cara-cara lain.

Dalam kaitan ini Branson dalam Winarno (2013: 149) menjelaskan sebagai berikut. *“Voting certainly is an important means of exerting influence; but it is not the only means. Citizens also need to learn to use such means as petitioning, speaking, or testifying before public bodies, joining ad-hoc advocacy groups, and forming coalitions.”* Bahwa suara tentu merupakan sarana yang penting pengaruhnya tetapi biasanya bukan satu-satunya cara. Warga juga perlu belajar untuk menggunakan cara-cara seperti petisi, berbicara atau dengan bersaksi di depan badan publik, bergabung dengan kelompok advokasi dan membentuk koalisi.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai voting bahwa selain voting cara lain yang dapat dipergunakan warga negara untuk mempengaruhi kehidupan politik sebagaimana yang dikemukakan Branson, juga warga negara bisa mempelajari tentang mengajukan petisi, berbicara/pidato untuk menunjukkan kebolehan di depan para anggota badan-badan publik, bergabung dengan kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. Sebagaimana halnya kecakapan-kecakapan

interaksi dan memonitor, kecakapan mempengaruhi seyogyanya mampu untuk dikembangkan secara sistematis.

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Branson (1998: 15-16) mengemukakan mengenai kata-kata untuk lebih memahami mengenai kecakapan intelektual. Berikut ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kecakapan partisipatoris:

Kemampuan partisipatoris:

- a. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain.
- b. Memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.
- c. Membangun koalisi, negosiasi, kompromi, dan mencari konsensus.
- d. Mengelola konflik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kecakapan partisipatoris dilihat dari bagaimana kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengambil keputusan melalui kerjasama dengan pihak lain, mampu memberikan penjelasan sehingga suatu

masalah yang dipaparkan dapat diketahui oleh pembuat kebijakan keputusan, kemudian mampu mengelola konflik dimanapun individu tersebut berada.

D. Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Depdiknas(2003: 3) pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan (sebelumnya disebut PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam yaitu segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.

Depdiknas (2006: 49) memberikan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Azyumardi Azra (201: 12) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi”. Sedangkan menurut Soedijarto “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang

secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Numan Somantri (2010: 1) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu pendidikan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, cerdas, berfikir kritis, demokratis, berkarakter cinta kepada bangsa dan negara Indonesia, dan berkepribadian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Depdiknas (2006: 49) mengemukakan bahwa tujuan umum PKn adalah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik, yang memiliki sikap demokratis, cerdas, terampil dan berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan.

c. Karakteristik Mata Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Hanna dalam Rachman (2012: 57) “untuk program disekolah yakni pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahan-bahan materi PKn harus disesuaikan atau direorganisasikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau sering disebut sebagai *basic human activities*”.

Warganegara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warganegara yang memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan dan berkepribadian.

Udin dan Dasmin (2012: 198) mengemukakan bahwa:

Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat-tingkat lokal maupun nasional maka partisipasi semacam ini memerlukan semacam penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan.

Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan yang terpenting adalah

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu
2. Pengembangan keterampilan intelektual dan partisipatoris
3. Pengembangan karakter dan sikap mental tertentu
4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional

Berdasarkan keempat kompetensi yang perlu dikembangkan diatas, Branson (1999: 8) mengemukakan “komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*”.

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Udin dan Dasmin (2012: 199) mengemukakan bahwa:

Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang harus diketahui oleh warganegara. Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintah, berbangsa, dan bernegara. Pembekalan materi akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh akal tentang hakekat kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian antar disiplin menggunakan pendekatan isomeristik yang tercermin dari ruang lingkup materi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi : persatuan dan kesatuan, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi Negara, kekuasaan dan politik, pancasila, dan globalisasi. Komponen ini harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus menerus

diajukan sebagai sumber belajar PKn. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah:

- 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan ?
- 2) Apa dasar-dasar politik Indonesia
- 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk konstitusi mengejawatkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia ?
- 4) Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia
- 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia

Branson (1998: 9)

2. Kecakapan kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Udin dan Dasmin (2012: 201) mengemukakan bahwa “komponen essensial kedua *civic education* dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Jika warganegara mempraktekan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam *civic knowledge* namun mereka pun harus menguasai kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan”. Hal ini sebagai penunjang terbentuknya warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjaab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi kecakapan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi

pendapat, menentukan dan mempertahankan sikap dan pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan *public*.

Kecakapan berpartisipasi merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, dimulai dalam kegiatan pembelajaran PKn. Siswa dapat belajar berinteraksi dalam kelompok, menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kematangannya. Siswa dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, atau membuat kesepakatan. Kecakapan intelektual dan berpartisipasi merupakan kecakapan yang menjadi kompetensi siswa dalam mata pelajaran.

Pendidikan kewarganegaraan, menurut Margareth S. Branson (1999: 15), secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kecakapan Intelektual dan Berpartisipasi

Kecakapan Intelektual	Kecakapan Berpartisipasi
1. Mengidentifikasi, untuk mengenali dengan jelas sesuatu, memiliki kemampuan membedakan, mengklasifikasi, dan menentukan asal-usul 1. Mendeskripsikan: obyek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat dan kualitas yang jelas, melalui laporan tertulis, atau verbal	1. Berinteraksi termasuk berkomunikasi dengan obyek yang berkaitan dengan masalah publik, keterampilan yang dibutuhkan adalah: bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun, menjelaskan kepentingan, mengembangkan koalisi, negosiasi, kompromi, mengelola konflik secara damai, dan mencari konsensus
2. Mengklarifikasi, melalui proses identifikasi, deskripsi, seseorang dapat menjelaskan sebab-sebab suatu peristiwa dan memahami makna dan pentingnya peristiwa, untuk menemukan ide dan alasan bertindak 3. Menganalisis, yaitu kemampuan	2. Memantau atau memonitor masalah politik dan pemerintahan, terutama dalam masalah publik, yang membutuhkan keterampilan, di antaranya : 1) Menggunakan berbagai sumber informasi, seperti: media masa peristiwa sebenarnya untuk

<p>menguraikan unsur-unsur ideal atau gagasan, proses politik, lembaga, konsekuensi dari ide, terhadap proses politik, memilih mana yang merupakan cara dengan tujuan, fakta dengan pendapat, tanggungjawab pribadi dan publik</p> <p>4. Mengevaluasi pendapat/posisi, dengan menggunakan kriteria /standar untuk membuat keputusan tentang kekuatan dan kelemahan isu/pendapat dan menciptakan ide baru</p> <p>5. Mengambil pendapat/posisi dengan cara memilih dari berbagai alternative dan membuat pilihan baru</p> <p>6. Mempertahankan pendapat melalui argumentasi berdasarkan asumsi yang diambil, dan merespon argumentasi yang tidak disepakati</p>	<p>mengetahui persoalan publik</p> <p>2) Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan pejabat pemerintahan dan lembaga pemerintah, misalnya menghadiri berbagai pertemuan atau rapat umum.</p> <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal, maupun informal, keterampilan yang dibutuhkan, antara lain:</p> <p>1) Melakukan simulasi tentang kegiatan kampanye pemilu, dengar pendapat di DPRD, pertemuan dengan pejabat negara, dan proses peradilan</p> <p>2) Memberikan suara bagi yang cukup usia</p> <p>3) Memberi kesaksian dihadapan publik</p> <p>4) Bergabung dalam lembaga advokasi, memperjuangkan tujuan bersama</p>
---	--

Sumber: Diadaptasi dari Center for Civic Education (1994) National Standard For Civics and Government. P 1-5, 127 – 135

3. Karakter Kewarganegaraan (*Civic Dispotitions*)

Udin dan Dasim (2012: 205) mengemukakan bahwa:

Komponen dasar ketiga dari *civic education* adalah *civic dispotitions* (Karakter Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional”. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, di sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*.

Mengenai karakter kewarganegaraan, dijelaskan dalam Branson (1999: 22) sebagai berikut, karakter warga negara termasuk sifat

pribadi, seperti tanggung jawab, efektif dan ilmiah. Karakter publik seperti, adab sopan santun, rasa hormat terhadap hukum, mempunyai pandangan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, berpikir kritis, berpendirian, kemauan untuk bernegosiasi dan berkompromi.

Ciri-ciri karakter pribadi dan kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Menjadi anggota masyarakat yang mandiri

Karakter ini terwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan semua ketentuan hukum atau peraturan secara bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran, dan mampu memnuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, yang meliputi: tanggung jawab menjaga diri sendiri, memberi nafkah menunjang kehidupan keluarga, merawat, mengurus dan medidik anak, memiliki wawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, bersedia jika mejadi saksi di pengadilan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, yang meliputi: mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun, menghargai hak dan kepentingan semua warga negara, dan

mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya.

- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif. Karakter ini mensyaratkan informasi yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan reflektif, mampu memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Karakter ini menghendaki kemampuan warga negara memberi penilaian kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan, demi kepentingan umum. Kapan kewajiban seseorang yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, selayaknya menolak harapan-harapan masyarakat pada persoalan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan, antara lain:
- a. Keberadaan (*civility*), misalnya menghormati dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
 - b. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya antara lain: menghormati hak yang sama dengan orang lain dalam hukum dan pemerintahan, mengajukan gagasan, bekerjasama
 - c. Menghormati hukum, dalam bentuk mau mematuhi hukum, meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan

melakukan tindakan dengan cara damai, legal dalam melakukan proses dan tuntutan normatif.

- d. Jujur, terbuka, berpikir kritis, bersedia melakukan negosiasi, tidak mudah putus asa, memiliki kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, toleransi, patriotik, dan berpendirian. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat, karakter ini menghendaki setiap warganegara memiliki kepedulian terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil tindakan yang tepat, jika mereka tidak mematuhi melalui cara damai dan berdasarkan hukum.